



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

SURAT-EDARAN
NOMOR SE 19 TAHUN 2017
TENTANG
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS)
TAHUN 2017

1. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2017 dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018, guna penyusunan pada RAPBN Tahun 2018 bisa menekankan percepatan dan peningkatan daya saing pembangunan secara menyeluruh.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan agar memperhatikan dan melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan penganggaran benar-benar fokus kepada penyampaian kegiatan prioritas sehingga program Kementerian Perhubungan dapat berjalan secara efektif dan hasilnya dapat dirasakan oleh pengguna jasa transportasi. Kegiatan prioritas yang ingin dikerjakan harus terukur dalam jumlah yang terbatas.
 - b. Alokasi anggaran diperuntukan pada unit-unit organisasi yang benar-benarakan menunjang kegiatan prioritas dan hasilnya dapat diselesaikan sebelum tahun 2019.
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terbatas hanya mampu membiayai investasi maksimal 30% dari kebutuhan yang ada, maka untuk itu perlu segera mencari solusi alternative pembiayaan melalui investasi swasta, Sehubungan dengan hal tersebut agar segera diselesaikan penyusunan "Buku Putih" yang berisi daftar list kegiatan yang akan dibiayai melalui kerjasama pemerintahan dan badan usaha (KPBU).

- d. Kementerian Perhubungan harus mampu bersaing dengan kapasitas yang ada, karena kompetisi ke depan bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, akan tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Sehubungan dengan itu diharapkan untuk melakukan evaluasi untuk mencari solusi yang terbaik.
 - e. Dalam rangka meningkatkan investasi asing maka diperlukan untuk mengevaluasi aturan-aturan yang ada agar tidak menyulitkan masuknya investasi.
 - f. Untuk ke depan diharapkan mencari terobosan-terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi tinggi dan tidak bersifat konvensional baik di bidang sarana maupun prasarana transportasi, sehingga diharapkan menjadi lebih efisien dan menurunkan biaya logistik.
 - g. Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan diharapkan untuk pandai menyesuaikan diri terhadap dinamika pembangunan yang ada dan tidak berfikir secara linear, namun diharapkan dapat berfikir secara non linier.
3. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001